

BAB V

PENUTUP

Daerah Pantura Jawa Tengah merupakan kawasan dengan letak strategis yang didukung oleh Jalur Pantura sebagai jalur utama sehingga terus berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Tengah. Perkembangan tersebut juga mendorong fenomena urbanisasi yang ada. Seiring dengan urbanisasi yang terus berjalan dan meningkat menunjukkan adanya perubahan terhadap tingkat kemiskinan suatu wilayah. Namun tentunya efek tersebut tidak sama pada semua wilayah karena setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik kemiskinan yang berbeda. Maka dari itu meneliti bagaimana hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan akan membantu untuk menjelaskan dan memetakan bagaimana karakteristik tiap wilayah terkait urbanisasi dan kemiskinan sehingga dapat menjadi saran atau acuan dalam membuat program pembangunan atau kebijakan agar lebih tepat sasaran.

5.1 Kesimpulan

Penelitian terkait urbanisasi dan kemiskinan tidak bisa hanya berfokus pada satu aspek saja karena pada dasarnya baik urbanisasi maupun kemiskinan bersifat multidimensi dengan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi. Urbanisasi sebagai suatu proses akan selalu berdampak pada berbagai aspek sehingga kajian atau analisis yang dilakukan setidaknya dapat menggambarkan bagaimana karakteristik urbanisasi pada masing-masing wilayah dan benar-benar menggambarkan kondisi yang nyata. Hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana urbanisasi berpengaruh pada kemiskinan. Fenomena urbanisasi salah satunya dapat dilihat adanya migrasi masuk, namun jika hal tersebut tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi maka akan mengakibatkan fluktuasi angka kemiskinan yang sering dijadikan sebagai standar untuk melihat bagaimana tingkat kemiskinan suatu wilayah. Maka dari itu bagaimana urbanisasi dapat berpengaruh pada kemiskinan merupakan fokus utama dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan serangkaian analisis akhirnya ditemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sejak awal dan menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan tipologi yang telah dibuat (lihat Gambar 4.22) wilayah dengan tingkat urbanisasi tinggi memiliki tingkat kemiskinan yang rendah yakni Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus. Sementara wilayah dengan tingkat urbanisasi rendah memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yakni Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Rembang. Dari kedua hal tersebut dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat urbanisasi berbanding terbalik

dengan tingkat kemiskinan yang berarti bahwa seiring dengan meningkatnya urbanisasi maka kemiskinan akan semakin menurun. Namun ada juga beberapa wilayah yang tidak termasuk dalam tipologi tersebut, Kota Pekalongan termasuk dalam tipologi urbanisasi dan kemiskinan tinggi sementara Kabupaten Pati termasuk dalam tipologi urbanisasi dan kemiskinan rendah. Maka dari itu selanjutnya dilakukan analisis koefisien korelasi untuk mengetahui apakah benar tingkat urbanisasi berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis semua wilayah memiliki korelasi negatif yang berarti bahwa tingkat urbanisasi berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan berlaku pada semua kabupaten/kota di wilayah studi. Dengan kata lain urbanisasi akan mengurangi kemiskinan yang ada. Adanya perbedaan antara hasil tipologi dan koefisien korelasi dikarenakan dalam pemetaan tipologi di ambil dari rata-rata skor urbanisasi dan kemiskinan masing-masing kabupaten/kota. Sementara dalam analisis koefisien korelasi digunakan data dalam kurun waktu 20 tahun agar hasilnya lebih akurat. Selain itu dapat dilihat kabupaten/kota mana saja yang memiliki keterkaitan yang erat antara urbanisasi dan kemiskinan. Wilayah dengan keterkaitan yang tinggi adalah Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Rembang.

Pada kajian literatur McGranahan (2015) yang berpendapat bahwa tingkat urbanisasi integral dengan pertumbuhan ekonomi, namun sayangnya di sisi lain urbanisasi menimbulkan beberapa masalah seperti ketidaksetaraan di dalam wilayah perkotaan yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan. Pada penelitian ini urbanisasi integral dengan pertumbuhan ekonomi namun tidak memberikan masalah kemiskinan, justru malah membantu mengurangi kemiskinan yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Arouri et al (2017) yang mengatakan bahwa urbanisasi dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang merupakan prasyarat untuk pengentasan kemiskinan. Secara keseluruhan berdasarkan penelitian pada akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil analisis tingkat urbanisasi wilayah yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi adalah Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus. Sementara wilayah dengan tingkat urbanisasi rendah adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal memiliki tingkat urbanisasi yang paling tinggi diantara wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan kota-kota tersebut merupakan pusat aktivitas khususnya Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Proporsi penduduk perkotaanya juga paling tinggi diantara wilayah lainnya yakni berada pada kisaran diatas 90% dari jumlah penduduknya yang berarti hanya sebagian kecil yang

merupakan penduduk pedesaan. Selain itu proporsi tenaga kerja pertaniannya pun rendah hal ini dikarenakan memang sektor ekonomi dominannya merupakan sektor tersier dengan distribusinya yang melebihi 50% sejak tahun 1995. Sementara wilayah dengan tingkat urbanisasi paling rendah diantaranya Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Brebes. Faktor utama yang menyebabkan urbanisasi di wilayah tersebut rendah adalah sektor ekonomi dominannya masih berupa sektor primer. Meskipun untuk Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati untuk saat ini mulai bergeser ke sektor tersier namun perbedaan distribusinya tidak terlalu besar dengan sektor primer. Maka dari itu proporsi tenaga kerja pertaniannya pun paling tinggi yakni berada pada kisaran 40% hingga 60% meskipun kerap mengalami penurunan tetapi sektor pertanian tetap menjadi matapencaharian utama masyarakatnya. Hal ini juga didukung dengan luasnya lahan pertanian yang ada, bahkan untuk Kabupaten Demak proporsinya lebih dari 50% yang berarti lebih dari setengah wilayahnya merupakan lahan pertanian. Selain itu proporsi luas lahan terbangun untuk 4 kabupaten tersebut masih cukup rendah tidak lebih dari 20%. Proporsi penduduk perkotaannya pun paling rendah dibandingkan wilayah lainnya dengan rata-rata (tahun 1995-2015) paling tinggi yakni Kabupaten Brebes sebesar 38,32%.

- Berdasarkan hasil analisis tingkat kemiskinan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Rembang. Sementara wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah adalah Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati. Jika dilihat dari rata-rata skornya Kabupaten Rembang, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi. Penyebab utamanya jika melihat dari data yang ada adalah ketiga kabupaten tersebut memiliki proporsi penduduk miskin yang paling tinggi dengan Kabupaten Brebes dengan rata-rata proporsi penduduk miskin dari tahun 1995-2015 paling tinggi yakni sebesar 26,27%, tiga kali lipat lebih besar dari Kota Tegal yang memiliki rata-rata proporsi penduduk miskin tahun 1995-2015 terendah yakni sebesar 8,22%. Sementara Kota Semarang memiliki rata-rata skor tingkat kemiskinan yang paling rendah. Jika dilihat dari datanya Kota Semarang memiliki proporsi penduduk miskin kedua setelah Kota Tegal, namun penurunan proporsi penduduk miskin di Kota Semarang lebih signifikan sehingga pada tahun 2015 memiliki proporsi penduduk miskin terendah yakni 4,96%. Selain itu secara keseluruhan pelayanan yang ada di Kota Semarang lebih baik dibanding wilayah lainnya khususnya pada bidang pendidikan. Diantara 14 kabupaten/kota yang ada, Kota Semarang memiliki rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf paling tinggi. Bahkan

hanya Kota Semarang yang memiliki RLS diatas sembilan yang berarti minimal masyarakatnya telah berhasil menamatkan jenjang SMP/ sederajat.

- Berdasarkan hasil tipologinya wilayah dengan urbanisasi tinggi-kemiskinan rendah adalah Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus. Wilayah dengan urbanisasi rendah-kemiskinan tinggi adalah Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Rembang. Kabupaten Pekalongan termasuk dalam urbanisasi tinggi-kemiskinan tinggi. Sementara Kabupaten Pati termasuk dalam urbanisasi rendah-kemiskinan rendah.
- Anomali yang terjadi di Kabupaten Pekalongan dikarenakan urbanisasi yang berjalan begitu cepat dapat meningkatkan resiko adanya ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga meskipun kemiskinan dapat berkurang karena adanya fenomena urbanisasi namun dapat muncul kantong-kantong kemiskinan baru lainnya khususnya di pedesaan. Pada Kabupaten Pekalongan meskipun memiliki sektor ekonomi dominan tersier namun penurunan proporsi tenaga kerja pertaniannya tidak signifikan wilayah lain yang berarti masih banyak masyarakatnya yang bertumpu pada sektor pertanian sehingga tidak dapat merasakan hasil dari sektor tersier. Selain itu AKInya pun merupakan yang paling tinggi di pantura Jawa Tengah, hal ini menjadi salah satu tanda bahwa kualitas kesehatannya masih rendah. Berdasarkan Departemen Kesehatan, 2014 AKI merupakan indikator yang peka dalam menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Nilai AKI yang tinggi berarti memperlihatkan bahwa kesejahteraan masyarakatnya masih rendah. Akses air bersih di Kabupaten Pekalonganpun paling rendah diantara kabupaten/kota lainnya di daerah Pantura Jawa Tengah, yang berarti bahwa pemenuhan terhadap akses air bersihnya tidak sebaik wilayah lainnya.
- Anomali yang terjadi di Kabupaten Pati dikarenakan urbanisasi yang berjalan secara perlahan membuat resiko ketimpangan yang terjadi semakin berkurang dengan begitu konsentrasi sumber daya berjalan dengan perlahan dan merata sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Sektor ekonomi utama Kabupaten Pati yang awalnya berupa sektor primer kemudian bergeser pada sektor tersier. Namun meskipun begitu perbedaan distribusi antara sektor primer dan tersier tidak cukup besar hanya berkisar 2%, dengan kata lain cukup berimbang antara keduanya. Sehingga meskipun saat ini sektor ekonomi dominannya berupa sektor tersier namun sektor primer masih memegang peranan penting dalam ekonomi wilayah dan masyarakatnya.

- Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi, urbanisasi di daerah Pantura Jawa Tengah memiliki hubungan negatif atau berbanding terbalik dengan kemiskinan yang berarti bahwa ketika urbanisasi meningkat maka kemiskinan akan menurun.

5.2 Rekomendasi

Penelitian mengenai hubungan urbanisasi dan kemiskinan di daerah Pantura Jawa Tengah diharapkan dapat berguna baik dalam kajian maupun mendukung program atau kebijakan pembangunan. Pembuatan program atau kebijakan pembangunan harus didasarkan dan disesuaikan dengan kondisi asli masing-masing wilayah karena semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga nantinya program atau kebijakan tersebut akan tepat sasaran. Berikut beberapa rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan penelitian hubungan urbanisasi dan kemiskinan di daerah Pantura Jawa Tengah:

- **Rekomendasi untuk Pemerintah**

- a) Pemerintah sebaiknya merancang program pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, bukan hanya kecepatan pembangunan sehingga tidak ada ketimpangan wilayah.
- b) Dalam menyusun rencana pembangunan, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan karakteristik urbanisasi yang ada sehingga nantinya seluruh dampak positif urbanisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal serta dampak negatifnya dapat diminimalisir dan segera diatasi.
- c) Dalam merancang program atau kebijakan terkait pengentasan kemiskinan jangan hanya berfokus pada aspek ekonomi karena kemiskinan bersifat multidimensi sehingga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain.
- d) Pengentasan kemiskinan sudah seharusnya dijadikan isu utama dalam setiap program pembangunan karena kemiskinan dipengaruhi dan mempengaruhi berbagai faktor yang berbeda sehingga akan sulit jika hanya fokus pada beberapa aspek.
- e) Pemerintah perlu mendorong agenda pembangunan daerah memprioritaskan pemberantasan kemiskinan sebagai skala prioritas utama.
- f) Perlu adanya rencana yang dibuat secara komprehensif dan lintas kabupaten/kota untuk mengatasi fenomena *counterurbanization* yang mungkin terjadi sehingga tidak menimbulkan permasalahan baik di kawasan perkotaan maupun pinggiran.
- g) Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menjadikan aspek pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam pengentasan kemiskinan.
- h) Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus lebih meningkatkan pelayanan kesehatan dan air bersih bagi masyarakatnya.

- i) Pemerintah Kabupaten Rembang, Kabupaten Batang, dan Brebes harus lebih gencar dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan.
- j) Pemerintah perlu mengusahakan penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai antara desa-kota untuk meminimalisir adanya ketimpangan wilayah salah satunya dengan perluasan industri kecil padat karya.
- k) Pemerintah daerah perlu memperkenalkan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakatnya untuk menggali sumber pendapatan yang memadai khususnya untuk wilayah-wilayah yang masih bertumpu pada sektor pertanian seperti Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Brebes.

- **Rekomendasi untuk Penelitian Lanjut**

- a) Perlu adanya penelitian lanjutan yang mendalami bagaimana masing-masing aspek dalam urbanisasi dapat mempengaruhi perkembangan kabupaten/kota dan mengurangi kemiskinan yang ada.
- b) Perlunya penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana urbanisasi mempengaruhi aspek-aspek kemiskinan dengan data *time series* sehingga hasilnya lebih akurat.
- c) Perlu adanya penelitian lanjutan terkait autokorelasi spasial urbanisasi dan kemiskinan dengan dengan unit data kecamatan sehingga dapat dilihat pola spasialnya.